

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penyusunan skripsi dari Bab pendahuluan hingga Bab pembahasan, maka pada Bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan hukum.

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum Pembatalan Status Pailit / Rencana Perdamaian tidak dilaksanakan Perusahaan BUMN (debitur). Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian apabila pihak debitur yakni Perusahaan BUMN tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut sehingga dinyatakan pailit. Bagi PT. Merpati Nusantara Airlines selaku debitur, sementara bagi PT. Dirgantara Indonesia yang dapat melaksanakan kewajiban kepada para krediturnya, pengadilan niaga dapat membatalkan status hukum pailitnya. Sehingga seluruh hak-hak mengenai perusahaan dapat kembali dipulihkan dan menjadi batal pailit, setelah proses kepailitan hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan restrukturisasi
2. Upaya yang harus dilakukan Perusahaan BUMN sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia maupun PT. Merpati Nusantara Airline. Akibat hukum yang dilakukan oleh BUMN sebagai suatu

institusi dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi. Restrukturisasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan. Kemudian langkah strategis tersebut meliputi Reorientasi bisnis, restrukturisasi Sumber Daya Manusia, Restrukturisasi Keuangan dan modal, serta peningkatan Kinerja perusahaan..

B. Saran

1. Restrukturisasi dalam tubuh BUMN harus benar-benar dilakukan, terutama dalam perbaikan managerialnya, sehingga peran BUMN dalam pertumbuhan perekonomian nasional akan lebih optimal.
2. Pengawasan terhadap Perusahaan BUMN harus selalu dilakukan karena keberadaan BUMN sebagai suatu industri masih dibutuhkan, antara lain karena perannya dalam menunjang perekonomian Negara dan juga sebagai objek vital nasional. Hal ini dapat dilihat dari prospek kelangsungan usaha BUMN yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah asset usaha yang masih memadai, dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.